

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023)

The Influence Of Local Government Revenue, Capital Expenditure, And Audit Opinion Of Regional Financial Performance (A Case Study Of Regional Government In East Java Province 2018-2023)

Enda Kusuma Herawati¹, Galuh Tresna Murti²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, endakusumahera@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, galuht@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Sektor publik dan pemerintah menggunakan kinerja keuangan sebagai metrik untuk mengukur keberhasilan keuangan. PAD, belanja modal, dan opini audit merupakan tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan keuangan dalam studi. Tujuan studi untuk mengetahui bagaimana opini audit, belanja modal, dan PAD mempengaruhi kesehatan fiskal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 38 daerah perkotaan di Provinsi Jawa Timur menjadi sampel penelitian. Pendekatan kuantitatif dipakai dalam penelitian ini. Metode nonprobability sampling menghasilkan jumlah sampel sebanyak “38 dari 29 kabupaten dan 9 kota dengan memakai sampel nonprobability”. Salah satu metode pengumpulan informasi untuk sebuah penelitian adalah dengan membaca dengan teliti literatur yang ada untuk setiap dan semua rincian yang terkait. Analisis regresi data panel dan pengujian hipotesis dipakai dalam analisis data penelitian ini dengan menggunakan statistik Eviews. Kinerja keuangan ditemukan secara signifikan dipengaruhi oleh opini audit, belanja modal, dan PAD secara bersamaan. Dampak terhadap kinerja keuangan dipengaruhi secara positif oleh PAD dan opini audit. Dampak belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kecil dan negatif.

Kata Kunci-kinerja keuangan, pendapatan asli daerah, belanja modal, opini audit

Abstract

The public sector and government utilize financial performance as a metric for measuring financial success. Local revenue, capital expenditure, and audit opinion are the three variables that impact financial success in this research. The objective of this research is to ascertain how audit opinions, capital expenditures, and local revenues impact the fiscal health of East Java Province's municipalities. A total of 38 urban areas in East Java province made up the research sample. Quantitative approaches are employed in this study. The nonprobability sampling method yields a sample size of 38 from 29 districts and 9 cities using saturation sampling. One method of gathering information for a study is to peruse the existing literature for any and all pertinent details. Panel data regression analysis and hypothesis testing were employed in this study's data analysis utilizing Eviews statistics. Financial performance was found to be significantly affected by audit opinion, capital expenditures, and local revenue all at once. The impact on financial performance is positively skewed by both local revenue and audit opinion. The impact of capital spending on the financial performance of local governments is small and negative.

Keywords-financial performance, local revenue, capital expenditure, audit opinion

I. PENDAHULUAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah indikator yang baik untuk melihat seberapa baik mereka mengelola dana. Setelah reformasi, pemerintah pusat telah mendelegasikan otoritas keuangan kepada masing-masing daerah melalui kebijakan otonomi. Salah satu indikasi kapasitas daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah keberhasilan keuangannya (Halim & Hanafi, 2016). Informasi mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak yang membutuhkannya. Salah satu rasio tersebut adalah rasio efisiensi, yang memperlihatkan seberapa baik pemerintah daerah mampu membangun kesuksesan mereka di masa lalu. Sederhananya, rasio efisiensi memberikan gambaran mengenai seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola anggaran mereka.

Pendapatan yang dihasilkan di dalam wilayah yurisdiksi sesuai dengan peraturan daerah yang relevan dikenal sebagai “PAD (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004)”. Pajak, retribusi, dan keuntungan dari pengelolaan aset-aset yang berbeda secara regional adalah contoh-contoh PAD yang sah. (Sumawan & Sukartha, 2016) adalah bahwa sumber daya keuangan daerah yang besar ditunjukkan oleh pertumbuhan pendapatan daerah yang signifikan setiap tahunnya. Efisiensi pemerintah daerah dalam membelanjakan dan mengelola dananya sendiri memperlihatkan efektivitasnya.

Investasi pada aset jangka panjang dan metode pembangunan daerah dikenal sebagai belanja modal, dan investasi ini memberikan manfaat tahunan dan lebih banyak uang untuk anggaran daerah. Salah satu cara untuk menentukan apakah kinerja pemerintah memberikan hasil yang bermanfaat adalah dengan meningkatkan program sehingga dapat memberikan layanan publik yang lebih berkualitas.

Menurut Insani dan Amin (2023), opini audit adalah jenis evaluasi laporan keuangan yang dipakai pemerintah daerah untuk menentukan seberapa baik mereka telah mengelola wilayah otonom mereka sesuai dengan prinsip atau kebijakan tertentu. Menurut Yusuf dkk. (2023), penilaian auditor atas keakuratan dan kelengkapan laporan keuangan yang disiapkan untuk perusahaan yang diaudit merupakan pernyataan profesional. “Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (TW), Wajar Dengan Pengecualian Dengan Paragraf Penegasan (WTP- DPP), dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) merupakan lima jenis pendapat yang dapat diberikan sesuai dengan Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2017”.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Tinjauan Pustaka Penelitian

1. Stakeholder Theory

Pada tahun 1963, Standford Research Institute (SRI) adalah yang pertama kali mengembangkan teori pemangku kepentingan. Menurut pandangan ini, pemerintah pusat punya tanggung jawab untuk memprioritaskan kebutuhan para pemangku kepentingannya. Kepentingan pemangku kepentingan dapat dipenuhi dengan lebih baik oleh pemerintah daerah yang mengelola keuangannya dengan baik. Salah satu cara teori pemangku kepentingan berkolerasi dengan topik kinerja keuangan pemerintah daerah adalah melalui persyaratan bahwa entitas tersebut harus mengungkapkan kondisi keuangan mereka. Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat dapat menilai efektivitas layanan publik dan mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari inisiatif ini. Evaluasi tersebut dapat membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerjanya di periode selanjutnya (Suryani & Robiansyah, 2022).

2. Kinerja Keuangan

Semua hak dan kewajiban moneter, serta aset moneter atau non-moneter yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang berkolerasi dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, didefinisikan dalam “UU No. 23 tahun 2014 tentang keuangan daerah”. Untuk membandingkan tujuan dengan realisasi program pemerintah yang efektif, sangat penting untuk mengukur kinerja keuangan, yang merupakan gambaran sejauh mana pemerintah daerah telah mengelola uang mereka (Rahayu & Lebang, 2022). Kinerja keuangan dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2018) :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan/belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100(2.1)$$

3. Pendapatan Asli Daerah

Jumlah yang diterima oleh pemerintah negara bagian dan daerah sebagai hasil dari kegiatan yang disahkan oleh “UU No. 23 tahun 2014”. Sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah federal, kebijakan

keuangan daerah bertujuan guna menaikkan PAD untuk dipakai dalam pembangunan daerah dan operasi pemerintah. Berikut adalah bagaimana PAD dihitung (Budiana & Rahayu, 2021):

$$\text{PAD} = \text{Retribusi Daerah} + \text{Pajak Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan} + \text{Lain lain PAD yang sah} \quad (2.2)$$

4. Belanja Modal

Tujuan dari belanja modal, sebagaimana didefinisikan oleh “Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, adalah untuk meningkatkan aset atau kekayaan daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan belanja rutin seperti pemeliharaan dalam kelompok belanja administrasi umum, dan yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran”. Berikut ini adalah bagaimana PAD dihitung (Alifa & Rahayu, 2022):

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan \& Mesin} + \text{Belanja Gedung \& Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi \& Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya} \quad (2.3)$$

5. Opini Audit

Penilaian profesional atas keandalan data yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dikenal dengan istilah opini audit sesuai dengan UU No. 15 tahun 2004. “Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan sektor publik, BPK memberikan lima opini yang berbeda, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TMP), dan tidak memberikan pendapat (TMP). Peraturan BPK RI No. 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menjelaskan tentang kelas-kelas ini”. Berdasarkan variabel dummy, skala opini audit yang dipakai dalam penelitian ini memberikan nilai 1 untuk pemerintah daerah ketika memperoleh opini WTP dan nilai 0 untuk opini lainnya (Farida *et al.*, 2019).

B. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

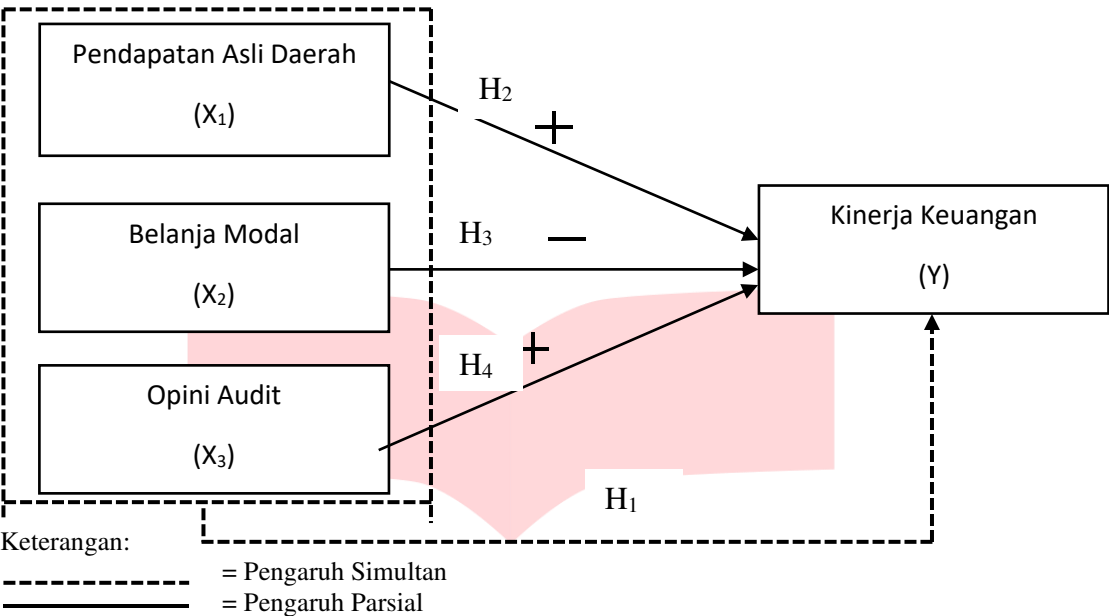
Penelitian ini akan melihat bagaimana PAD mempengaruhi kesehatan anggaran pemerintah daerah. Semua uang yang diterima pemerintah kota dari yurisdiksinya sendiri dianggap sebagai PAD. Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif oleh PAD (Masitha, 2019). (Sriwijayanti & Apriyanti, 2020) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Investasi dengan jangka waktu pengembalian yang lebih panjang dikenal sebagai belanja modal, dan dipakai untuk meningkatkan perekonomian daerah, layanan publik, dan infrastruktur. Sejauh mana distribusi dana belanja modal berdampak pada kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dan menyediakan layanan publik. Penelitian ini akan memberikan pencerahan tentang topik tersebut. Laba badan publik terpukul ketika mereka membelanjakan uang untuk proyek-proyek modal (Antari & Sedana, 2018). Penelitian kedua menemukan bahwa belanja modal merugikan laba pemerintah kota (Pereira Sarmiento, 2020).

3. Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Opini audit adalah penilaian pihak ketiga mengenai seberapa baik lembaga pemerintah mengikuti semua aturan dan hukum keuangan dan akuntansi. Tujuan studi untuk mengetahui seberapa besar kepercayaan publik terhadap kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab penganggaran pemerintah daerah dipengaruhi oleh kualitas opini audit (Zahrah *et al.*, 2024). Temuan dari penelitian Astawa dan Suandani (2021) menunjukkan bahwa opini audit berdampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Data diolah oleh penulis (2024)

III. METODOLOGI PENELITIAN

Studi memakai teknik kuantitatif. Populasi studi adalah pemerintah daerah Jawa Timur yang meliputi 29 kabupaten dan 9 kota. Penelitian ini menggunakan strategi nonprobability sampling berdasarkan pendekatan sampling jenuh untuk prosedur pengambilan sampel. Sampel studi terdiri dari 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018 hingga 2023. Setelah mengalikan jumlah sampel dengan jumlah tahun investigasi, maka diperoleh total data sebanyak 228 data selama periode lima tahun. Berikut adalah persamaan regresi data panel dari studi:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y= Kinerja keuangan Pemerintah Daerah

α = Konstanta Regresi

β_1 = Koefisien Regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

β_2 = Koefisien Regresi Belanja Modal

β_3 = Koefisien Opini Audit

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2 = Belanja Modal

X_3 = Opini Audit

ε = Tingkat Kesalahan Pengganggu (standar error)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis statistik deskriptif

Menganalisis data dengan melihat nilai terendah, tertinggi, rata-rata (mean), dan standar deviasi, dan kemudian menjelaskan artinya. Berikut hasil studi memakai statistik deskriptif:

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Analisis Deskriptif

	X1	X2	X3	Y
Mean	857856425...	645895006...	0.81578947...	1.62486315...
Median	375631914...	351616373276	1	0.17629483...
Maximum	107238248...	910818634...	1	153.560369...
Minimum	242783104	139076160	0	9.68335794...
Std. Dev.	125503013...	989535792...	0.38850871...	12.6833385...

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews-12 (2024)

Hasil pengujian pada table 4.1:

1. Berdasar hasil pengujian statistic deskriptif pada tabel 4.1 diketahui bahwa pada variabel kinerja keuangan (Y) pada tahun 2018-2023 memperlihatkan nilai rata-rata 1.62486315. Nilai maksimum kinerja keuangan 153.560369 yang dimiliki oleh Kabupaten Jember, lalu nilai minimum kinerja keuangan 9.68335794 yang dimiliki oleh Kota Probolinggo. Secara keseluruhan nilai standar deviasi pada kinerja keuangan 12.6833385.
2. Pada variabel PAD (X1) pada tahun 2018-2023 memperlihatkan nilai rata-rata 857856425. Nilai maksimum PAD 107238248 yang dimiliki oleh Kota Surabaya, lalu nilai minimum 242783104 Kota Probolinggo. Secara keseluruhan nilai standar deviasi 125503013.
3. Pada variabel belanja modal (X2) pada tahun 2018-2023 memperlihatkan nilai rata-rata 645895006. Nilai maksimum belanja modal 910818634 yang dimiliki oleh Kota Surabaya, lalu nilai minimum 139076160 Kota Madiun. Secara keseluruhan nilai standar deviasi 989535792.
4. Pada variabel opini audit (X3) pada tahun 2018-2023 memperlihatkan nilai rata-rata 0.81578947. Nilai maksimum opini audit 1 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, lalu nilai minimum 0 yang memperoleh opini selain wajar tanpa pengecualian. Secara keseluruhan nilai standar deviasi 0.38850871

B. Uji Asumsi klasik

Penelitian ini, yang dipakai terdiri dari uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Adapun hasil dari uji asumsi klasik yang dilakukan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Uji heteroskedastisitas dirancang untuk mengetahui apakah residual dari satu pengamatan tidak sama dalam hal varians di dalam model regresi. “Homoskedastisitas menggambarkan keadaan dimana varians residual tetap dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain, sedangkan heteroskedastisitas menggambarkan keadaan dimana varians residual berfluktuasi atau tidak tetap”. Untuk melakukan uji ini, dipakai variabel independen sebagai prediktor dan Uji Glejser sebagai koefisien regresi. Tidak adanya heteroskedastisitas ditunjukkan dengan tingkat kepercayaan Uji Glejser yang lebih besar dari 0,05.

Tabel 4. 2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.315325	Prob. F(3,223)	0.2702
Obs*R-squared	3.946914	Prob. Chi-Square(3)	0.2673
Scaled explained SS	7.700590	Prob. Chi-Square(3)	0.0526

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews-12 (2024)

Pada tabel 4.2 dapat dilihat nilai probability chi-square dari Obs*R- Squared 0.2673 lebih besar dari 0,05. Masing-masing variabel independent didapatkan nilai prob. > 0,05. Maka dapat disimpulkan pada model ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Uji Multikolinearitas untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas saling berkorelasi dalam model regresi. Agar suatu model dapat dikatakan baik, maka variabel-variabel independen tidak boleh berkorelasi satu sama lain. “Bisa dinyatakan model punya masalah multikolinearitas jika koefisien korelasi antar variabel independen lebih dari 0,8, menurut Gujarati (2013). Sebaliknya, multikolinearitas tidak ada dalam model jika koefisien korelasi kurang dari 0,8”.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Mutikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.128857	5.741440	NA
X1	1.50E-25	1.478382	1.102515
X2	4.22E-25	1.585267	1.110188
X3	2.495567	5.490623	1.011431

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews-12 (2024)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

C. Analisis Regresi Data Panel

Setelah melakukan metode regresi data panel dengan Eviews, pengujian yang memperlihatkan bila FEM merupakan model regresi yang paling sesuai untuk studi. Hasil uji t dan regresi data panel ada pada tabel di bawah :

Tabel 4.4 Regresi Data Panel dan Uji t

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	40.030865	3	0.0000
Cross-section random effects test comparisons:			

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.000000	0.000000	0.000000	0.0000
X2	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.0000
X3	3.912942	1.936090	0.689107	0.0172
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.996681	1.583194	-5.050979	0.0000
X1	6.913155	4.107251	16.83159	0.0000
X2	-3.49636	7.055081	-0.495582	0.6208
X3	3.912942	1.696493	2.306488	0.0222
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.671354	Mean dependent var		1.624863
Adjusted R-squared	0.601055	S.D. dependent var		12.68334
S.E. of regression	8.011060	Akaike info criterion		7.160935
Sum squared resid	12001.11	Schwarz criterion		7.777616
Log likelihood	-775.3466	Hannan-Quinn criter.		7.409747
F-statistic	9.550025	Durbin-Watson stat		1.965429
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews-12 (2024)

Berdasar hasil regresi di atas, diperoleh persamaan garis regresi sebagai berikut:

C = -7.996681 (a) + 6.913155 (X1) – 3.49636 (X2) + 3.912942 (X3)

Persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Jika variabel Y tetap konstan, maka variabel kinerja keuangan -7,996681 sesuai dengan konstanta α -7,996681.
2. Dengan asumsi semua faktor independen lainnya tetap, maka faktor kinerja keuangan akan mengalami peningkatan 6.913155 sesuai dengan koefisien regresi PAD 6.913155.
3. Dengan asumsi faktor independen lain nilainya tetap, maka koefisien regresi belanja modal -3,49636 memperlihatkan bahwa akan menurunkan variabel kinerja keuangan -3,49636.
4. Dengan asumsi semua faktor independen lain nilainya tetap, maka koefisien regresi opini audit 3.912942 memperlihatkan bahwa akan menaikkan variabel kinerja keuangan 3.912942.

D. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Di sini, kami menggunakan uji F-juga dikenal sebagai uji simultan-untuk mengetahui berapa banyak variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan tujuan untuk menentukan apakah variabel-variabel independen dari sebuah model regresi punya pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap nilai variabel dependen.

Pada tabel 4.7 dapat dilihat uji F pada eviews. Nilai uji F yang diberi label F-statistik adalah 9.550.025 dengan nilai p value 0,000. Variabel yang diteliti adalah PAD, opini audit, dan belanja modal. Temuan ini memperlihatkan bila "PAD, belanja modal, dan opini audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan", yang merupakan variabel dependen. dikarenakan kinerja keuangan mendapatkan hasil yang signifikan 0.0000. Artinya, ketiga faktor tersebut punya pengaruh terhadap hasil keuangan jika dilihat secara keseluruhan.

E. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memperlihatkan sejauh mana satu variabel independen menjelaskan varians yang diamati dalam variabel dependen. Berdasarkan data pada Tabel 4.4, temuan-temuan berikut ini diperoleh dari penelitian:

1. Nilai t hitung 16.83159 dengan nilai signifikansi 0.0000 > 0.05 dihasilkan oleh hipotesis pertama (X1) mengenai pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan. Maka, hipotesis peneliti (X1) adalah benar; PAD memang benar meningkatkan kinerja keuangan.
2. Nilai signifikan 0,6208 < 0,05 dan nilai t-statistik -0,495582 dihasilkan oleh hipotesis kedua (X2) mengenai pengaruh belanja modal pada kinerja keuangan. membantah hipotesis peneliti (X2) yang memperlihatkan bila belanja modal berdampak signifikan pada kinerja keuangan.
3. Hipotesis ketiga (X3) yang menguji dampak opini audit pada kinerja keuangan menghasilkan nilai t hitung 2.306488 dan nilai signifikansi 0.222 > 0.05. Opini audit berdampak positif pada kinerja keuangan. Hipotesis peneliti (X3) benar.

F. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Salah satu cara untuk mengukur kekuatan variabel independen dalam sebuah fungsi adalah dengan menguji koefisien determinasi (R²). R² berkisar antar nol hingga satu, dengan nilai antar nol dan satu. Model dianggap baik jika nilainya sekitar satu.

Tabel 4.4 menampilkan nilai R square yang telah diperbaharui, yaitu 0.601055, sesuai dengan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. mengindikasikan bahwa opini audit, PAD, dan belanja modal menjelaskan 60,10 persen dari kinerja keuangan, sedangkan faktor lain menjelaskan 39,90 persen lainnya.

G. Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil uji parsial PAD berdampak positif secara signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil hipotesis kedua studi sejalan dengan Sofyan & Akbar (2024), Zahrah dkk (2024) dan Sari dkk (2020) punya dampak yang baik pada kinerja keuangan pemerintah daerah. disebabkan oleh fakta bila PAD merupakan sumber pendapatan bersih yang harus diakui oleh pemerintah daerah, terutama jika mereka punya kekuasaan dan kebebasan untuk mengelola sumber pendapatan dari daerah mereka sendiri. Dengan lebih banyak uang yang masuk dari PAD, pemerintah dapat menggunakan lebih banyak sumber daya untuk membangun pemerintah daerah yang mematuhi ide otonomi daerah, yang seharusnya mengarah pada peningkatan hasil keuangan bagi pemerintah tersebut.

dapat memperlihatkan bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka dengan bantuan PAD, yang merupakan uang yang berasal langsung dari daerah. karena, dalam jangka panjang, uang semacam ini dapat dipakai untuk pembangunan daerah, yang mengarah ke daerah yang lebih otonom dan mandiri. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik dikaitkan dengan jumlah PAD yang lebih besar.

2. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh belanja modal, sesuai dengan hasil uji parsial. Sesuai dengan hasil hipotesis keempat penelitian ini, yang konsisten dengan penelitian Putri & Yuniarta (2023). Kinerja keuangan pemerintah daerah membutuhkan waktu untuk merefleksikan dampak belanja modal. Inisiatif pengembangan belanja modal terkenal lambat dan jarang memberikan efek yang diinginkan. Maka, jika analisis dilakukan dalam periode waktu yang singkat, mungkin tidak cukup waktu untuk mengukur dampaknya secara langsung.

3. Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Opini audit secara signifikan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, berdasarkan uji parsial. Temuan hipotesis ketiga studi mendukung temuan studi lain yang memperlihatkan bahwa opini audit berdampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Oktawina & Handayani, 2024; Zahrah et al., 2024). Opini audit yang baik mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah mengikuti GAAP dengan baik dan laporan keuangannya memadai. Para pemangku kepentingan termasuk investor, kreditor, dan masyarakat dapat punya kepercayaan terhadap laporan keuangan karena opini audit wajar tanpa pengecualian menandakan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun dengan benar, akurat, dan terbuka. Dengan demikian, opini audit yang positif memberikan keyakinan kepada pihak eksternal tentang keandalan informasi keuangan pemerintah daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan membuka peluang untuk mendapatkan sumber pembiayaan eksternal dengan syarat yang lebih baik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pengujian secara simultan

Bukti dari opini audit dan belanja modal yang dilakukan pada saat yang bersamaan memperlihatkan bahwa faktor-faktor tersebut secara signifikan mempengaruhi kinerja “keuangan pemerintah daerah”. Maka, untuk mendapatkan hasil keuangan yang terbaik, pemerintah daerah harus fokus dan meningkatkan pengelolaan ketiga faktor tersebut secara bersamaan.

2. Berdasarkan pengujian secara parsial:

- a. Terdapat Kolerasi yang positif dan signifikan secara statistik antar PAD dan keberhasilan keuangan pemerintah daerah. mengindikasikan bahwa pemerintah akan berinvestasi lebih banyak dalam pembangunan pemerintah daerah berdasarkan ide otonomi daerah seiring dengan meningkatnya pendapatan PAD, yang mengarah pada kinerja keuangan yang lebih baik di tingkat kota. Menurut teori pemangku kepentingan, adalah tugas pemerintah daerah untuk memastikan bahwa aset daerah dikelola dengan cara yang menguntungkan semua pemangku kepentingan, terutama penduduk lokal. PAD adalah metrik penting untuk mengukur kekayaan daerah; PAD yang lebih besar mengindikasikan bahwa pemerintah daerah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengelola kekayaan dan potensi daerah.
- b. Kinerja keuangan pemerintah daerah sedikit banyak dipengaruhi oleh belanja modal. Meskipun pemotongan belanja modal tidak akan berdampak besar pada laba pemerintah daerah, pemotongan tersebut akan berdampak pada infrastruktur dan pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja keuangan mereka. Pemerintah daerah dipercayakan dengan tugas untuk mengawasi dana belanja daerah sesuai dengan teori pemangku kepentingan. mencakup belanja modal untuk tanah, peralatan, mesin, bangunan, jalan, dan aset lainnya. Dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama, dana belanja daerah dikelola dengan tujuan untuk memajukan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan juga akan meningkat sebagai hasil dari.
- c. Terdapat pengaruh yang positif dan cukup besar dari opini audit pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, kemungkinan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat seiring dengan meningkatnya opini audit. Menurut teori stakeholder, pemerintah daerah harus terbuka dan jujur dalam

pengelolaan fiskalnya agar kepentingan semua pihak terpenuhi, terutama kepentingan masyarakat. Pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK merupakan salah satu cara untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah.

B. Saran

1. Aspek Teoritis

Studi memberi wawasan berharga mengenai dampak opini audit, belanja modal, dan PAD pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Studi bisa menjadi referensi yang berharga bagi para akademisi di bidangnya. Temuan yang berbeda juga dapat diperoleh dengan menggunakan faktor-faktor tambahan, seperti variabel kontrol dan variabel moderasi. Karena survei ini tidak mencakup tahun 2018-2023, kami berharap lebih banyak kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang dapat diikutsertakan dalam studi selanjutnya.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Pemerintah

Jika pemerintah daerah ingin meningkatkan kinerja keuangan mereka, mereka perlu melihat bagaimana mereka menangani PAD. Strategi yang efektif diperlukan untuk merealisasikan potensi PAD tanpa mengorbankan efisiensi atau produktivitas. Sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menegakkan standar yang lebih tinggi dalam hal tanggung jawab fiskal dan keterbukaan. Mencapai pandangan audit yang positif adalah salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk memenangkan hati para pemangku kepentingan dan masyarakat. Belanja modal juga membutuhkan pengelolaan yang cermat oleh pemerintah daerah. Memperbaiki prosedur penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan belanja modal perlu dilakukan untuk menjamin bahwa investasi yang dilakukan dapat memberikan hasil yang terbaik sepanjang waktu.

b. Bagi Akademisi

Bagi pihak akademisi, studi bisa diajukan sebagai bahan studi kepustakaan dan sumber referensi peneliti selanjutnya. Kemudian untuk studi selanjutnya dibagian variabel belanja modal disarankan untuk menambah periode penelitian agar dapat melihat lebih banyak lagi dampak secara langsung yang terjadi diakibatkan oleh belanja modal yang pengelolaannya lebih efisien dan tepat sasaran di Provinsi Jawa Timur

REFERENSI

- Adelima, D. (2024). Pengaruh Aset dan Opini Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 4551-4560.
- Ajija, S. B., Sari, D. W., Seitianto, R. H., & Primanti, M. R. (2020). Cara Ceirdas Meinguasai Eiviews. Saleimba eimpat.
- Aldi Raviyanti, A., & Rahayu dan Dewa Putra Krishna Mahardika, S. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Terhadap IPM Dengan Belanja modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2009-2013): Vol. XXII (Issue 02).
- Amalia Fachrudin, K. (2022). Analysis Of The Effect Of Regional Original Income And Fund Transfers On City Government Economic Growth In North Sumatra Province Regional and Rural Development Planning Study Program. In *International Journal of Science*. <http://ijstm.inarah.co.id>
- Apridiyanti, A. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Dan Kota Di jawa barat 2013-2017. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 4(3), 32-41. <https://doi.org/10.29407/jae.v4i3.12822>
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., & Farida, D. N. (2019). The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3745>

- BPK RI (2023) Anggota V BPK RI Dorong Pemprov Jatim Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK. Available at: <https://jatim.bpk.go.id/berita-utama/anggota-v-bpk-ri-dorong-pemprov-jatim-segera-tindaklanjuti-rekomendasi-bpk/> (Accessed: 1 September 2024).
- BPKAD provinsi Jawa Timur (2023) Realisasi Pendapatan dan Belanja Provinsi Jatim TA 2022 Lampau Target, BPKAD provinsi Jawa Timur - Berita. Available at: <https://bpkad.jatimprov.go.id/article/realisasi-pendapatan-dan-belanja-provinsi-jatim-ta-2022-lampaui-target> (Accessed: 1 September 2024).
- Budiana, R., & Rahayu, S. (2021). The Influence of Local Government Revenue and Intergovermental Revenue of Regional Performace(Case Study on Provincial Government In Indonesia In 2020).
- Cahyaningsih, & Lestari, T. U. (2021). *The Effect of Corporate Social Responsibility and Higher Academic Education Expert on Audit Opinion in Light of The Company Profile Perspective. Review of International Geographical Education Online*, 11(3), 43–54. <https://doi.org/10.33403/rigeo>.
- Dewata, E., Jauhari, H., Aprianti, S., & Hijria, E. N. (2018). The Effects of Local Government Characteristics and Audit Opinion on the Performance of District and City Governments in Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 151–162. <https://doi.org/10.24815/jdab.v5i2.9057>
- Ghazali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariatei deingan program IBM SPSS 25.
- Hasanuddin, M. Z., & Suryani, E. (2019). *The Influence of Financial Performance, Corporate Governance, and Stock Prices to the Sustainability Reporting (Study of companies that listed on Indonesia Stock Exchange in 2014 – 2017)*. 343(Icas), 119–123. <https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.26>
- Jatim, D. K. (2019). SEKILAS JAWA TIMUR. Retrieved from [jatimprov.go.id](http://jatimprov.go.id/read/profil/sekilas-jawa-timur) (Media Jatim Menuju E-Government: <http://jatimprov.go.id/read/profil/sekilas-jawa-timur> (16 Oktober 2023)
- Kahar, A., Furqan, A. C., & Tenripada, T. (2023). The Effect Of Budget, Audit And Government Performance: Empirical Evidence From Indonesian Regional Governments. *Economy of Regions*, 19(1), 289–298. <https://doi.org/10.17059/EKON.REG.2023-1-22>
- Lestari, E., & Hapsari, D. W. (2023). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013-2018). Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom.
- Luthfiyatul Farida, A., Roziq, A., & Maria Wardayati, S. (2019). *Determinant Variables Of Enterprise Risk Management (ERM), Audit Opinions And Company Value On Insurance Emitents Listed In Indonesia Stock Exchange*. *International Journal of Scientific & Technology Research* 8, 7. www.ijstr.org
- Maramis, A., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Provinsi Di Indonesia Tahun 2020). *Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia*.
- Meliawati, D., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Pratama, B. C. (2022). *The Effect of Local Revenue on Capital Expenditure, Infrastructure Financing, Government Accountability Performance System and Budget Refocusing in Central Java Province During Pandemic*. *Business and Accounting Research (IJEBA)* Peer Reviewed-International Journal, 6. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBA>
- Nasution, D. A. D. (2019). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Niswani, N., Ikhyanuddin, I., Firdaus, R., & Nurhasanah, N. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6367>
- Nugraha, A. (2021). Influence Of Financial Audit Findings, Governments Wealth, Size Of Government And Leverage On The Performance Of Regency/City Governments In Indonesia. In *IJAFIBS* (Vol. 9, Issue 2). www.ijafibs.pelnu.ac.id
- Nugroho, A. E., & Hardi, M. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus, Dan Dana bagi hasil terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah Kota/Kabupaten se-jawa barat tahun 2014. *JEAI7: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02). <https://doi.org/10.30996/jeai7.v3i02.3178>
- Nurbaiti, A., & Permatasari, N. P. A. I. (2019). The effect of audit tenure, disclosure, financial distress, and previous year's audit opinion on acceptance of going concern audit opinion. *HOLISTICA – Journal of Business and Public Administration*, 10(3), 37–52. <https://doi.org/10.2478/hjbpa-2019-0028>

- Nurbaiti., A dan Yanti, S. D. (2022). The Influences of Company's Growth, Cash Flow, and Debt Default on the Acceptance of Going Concern Audit Opinions. *The Indonesian Journal of Accounting Research*. 25. (3): 359-382.
- Oktaviani, B., & Rahayu, S. (2020). *The Influence of Original Local Governement Revenue, Balance Fund, and Government Size on Regional Financial Perfomance*(Case Study in the District/City of West Java Province in 2015-2018).
- Oktawiana, R., & Handayani, D. F. (2024). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Karakteristik Daerah terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera. *Jurnal Ekplorasi Akuntansi*, 6(1), 117-131.
- Permendagri-No.13. (2016). Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Jakarta: Republik Indonesia
- PP-No.24. (2005). Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Republik Indonesia
- Pratama, A. B., & Cholid Mawardi, D. M. (2022). 02 Februari 2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang 25 (Vol. 11).
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>
- Putri, N. P. A. S., & Yuniarta, G. A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(01), 133-147.
- Putu, N., Putri, A. S., & Yuniarta, G. A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021. <https://doi.org/10.23887/jippg.v3i2>
- Robinson Sihombing, P., & Marsinta Arsani, A. (2020). Pengaruh Transparansi, LKPD dan PAD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ecodemica*, 4(2). <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica>
- Sari, C. Y. P., Priono, H., & Widayantie, T. D. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Terhadap Kinerja dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Mebis*, 5(1), 24-30.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Ukuran Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Seikaran, U., & Bougiei, R. (2017). Metode Peineilitian untuk Bisnis; Peindeikatan Peingeimbangan Keiahlian. Saleimba eimpat.
- Sofyan, A., & Akbar, F. S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Pembiayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Gerbang Kertosusila. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 1276-1287.
- Sriwijayanti, H., & Apriyanti, N. (2020). Analysis of Regional Original Revenue, Capital Expenditure, and Intergovernmental Revenue on Local Governement Financial Perfomance.
- Suandani, K. P., & Astawa, I. G. P. B. (2021). Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia. Email: venisuandani88@gmail.com.
- Sulistyowati, D., & Wibowo, P. (2022). Infrastructure Spending in the Characteristics of the Regions: Towards the Achievement of Sustainable Development Goals. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 25(03), 359–382. <https://doi.org/10.33312/ijar.622>
- Sumawan, I. W., & Sukartha, I. M. (2016). Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (UNUD)*, Bali, Indonesia.
- Suryani, P., & Robiansyah, A. (2022). Open Government dan Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka, Indonesia*. Corresponding Author: Pesi Suryani. Email: pesi@ecampus.ut.ac.id.

- Suryani, E., & Sri Fajaryani, N. luh G. (2018). Struktur Modal , Likuiditas , dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 10(2), 74–79.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian Kuantitatif. Alfabeta
- UU-No.33. (2004). Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Republik Indonesia
- UU-No.15. (2004). Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Jakarta: Republik Indonesia
- UU-No.32. (2014). Pelaksanaan Otonomi Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta: Republik Indonesia
- Widya Safitri, B., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Winarni, D. (2023). The effect of pad, capital expenditures, government size, and budget changes on regional financial performance (in central java province in 2019-2021). In IJAFIBS (Vol. 10, Issue 4). www.ijafibs.pelnus.ac.id
- Yusuf, F. A., Nurbaiti, A., & Murti, G. T. (2023). Pengaruh Opini Audit, Financial Distress, dan Ukuran Perusahaan terhadap Auditor Switching (Studi pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017 – 2021). *Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia*.
- Zahrah, F. A., Zaen, M. R., & Mellinia, S. P. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(1), 369-384.

